

<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	21
C. Metode Pengambilan Data .....	22
D. Teknik Pengumpulan Data .....	23
E. Analisis Data .....	25
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Nilai Manfaat Langsung dan Nilai Manfaat Tidak Langsung .....	45
C. Total Nilai Value (TEV) Ekonomi Kawasan Wisata Alam Latuppa ...	61
D. Analisis Input Output .....	62
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian .....	20
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian.....	22
Gambar 3. Tabel Transaksi <i>Inputoutput</i> dalam Suatu Perekonomian Wilayah .....	30
Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	51
Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Gambar 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tanggungan.....	53
Gambar 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	54
Gambar 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan .....	55
Gambar 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	56
Gambar 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Daerah Asal .....	57
Gambar 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Objek Wisata.....	58
Gambar 12. Ilustrasi <i>Inputoutput</i> Sektor Kawasan Hutan di Kawasan Wisata Alam Latuppa.....	80
Gambar 13. Grafik Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Daya Kepekaan ..	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identifikasi Manfaat Langsung dan Manfaat Tidak Langsung Kawasan Wisata Alam Latuppa .....	26
Tabel 2. Data Penduduk Kecamatan Mungkajang Tahun 2021 .....	41
Tabel 3. Data Jumlah Kunjungan Wisata 10 Tahun Terakhir di Kawasan Wisata Alam Latuppa .....	44
Tabel 4. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang Dimanfaatkan Masyarakat di Sekitar Kawasan Wisata Alam Latuppa .....	45
Tabel 5. Rekapitulasi Nilai Manfaat Langsung HHBK .....	49
Tabel 6. Unit-Unit Usaha di Kawasan Wisata Alam Latuppa .....	63
Tabel 7. Uraian <i>Output</i> Pembentuk Sektor Kawasan Hutan .....	68
Tabel 8. Uraian <i>Output</i> Pembentuk Sektor Peternakan .....	70
Tabel 9. Uraian <i>Output</i> Pembentuk Sektor Perdagangan .....	71
Tabel 10. Uraian <i>Output</i> Pembentuk Sektor Transportasi .....	72
Tabel 11. Uraian <i>Output</i> Pembentuk Sektor Jasa .....	73
Tabel 12. Nilai <i>Output</i> Menurut Sektor Ekonomi di Wilayah Sekitar Kawasan Wisata Alam Latuppa .....	74
Tabel 13. Struktur Nilai Tambah Bruto Menurut Sektor Ekonomi di Kawasan Wisata Alam Latuppa Tahun 2021 .....	74
Tabel 14. Matrik Kebalikan Leontif dan Permintaan Akhir di Kawasan Wisata Alam Latuppa .....	84
Tabel 15. Lanjutan Matriks Kebalikan Leontif dan Permintaan Akhir di Kawasan Wisata Alam Latuppa .....	84

Tabel 16. Perubahan Output Sektor Ekonomi di Kawasan Wisata Alam

Latuppa .....85

Tabel 17. Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Daya Kepekaan Tiap

Sektor Ekonomi di Kawasan Wisata Alam Latuppa .....89

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penilaian Manfaat Kepariwisata.....	101
Lampiran 2. Kuesioner Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Wisata Alam Latuppa .....	102
Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Pengambilan Data Lapangan Informasi Data Responden/Pengunjung di Kawasan Wisata Alam Latuppa .....	112
Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Pengambilan Data Lapangan Jenis Pengeluaran Selama Berwisata Tiap Responden di Kawasan Wisata Alam Latuppa .....	114
Lampiran 5. Tabulasi Data .....	116
Lampiran 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda , Analisis Semilog, dan Uji Normal .....	119
Lampiran 7. Tabel Transaksi <i>Inputoutput</i> Sektor Ekonomi Kawasan Wisata Alam Latuppa.....	123
Lampiran 8. Analisi Matriks dan Perhitungan Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Daya Kepekaan .....	124
Lampiran 9. Data Responden (Kegiatan Usaha) di Kawasan Wisata Alam Latuppa.....	130
Lampiran 10. Data Jumlah Responden pada Tiap Unit Usaha Rumah Tangga serta <i>Output</i> yang dihasilkan di Kawasan Wisata Alam Latuppa .....	135



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya kawasan hutan ditujukan untuk memperoleh manfaat nyata (*tangible benefits*) maupun tidak nyata (*intangible benefits*). Namun banyak manfaat tersebut baik berupa barang atau jasa yang belum memiliki pasar (*un-market*). Manfaat yang tidak nyata sering/belum banyak diketahui (dimengerti) dan sulit diwujudkan (dihitung) dalam nilai ekonomi secara kuantitatif (Nurfatriani, 2006). Terlebih lagi untuk mengambil keputusan di daerah sering tidak mau tahu tentang nilai tidak nyata tersebut. Untuk memahami manfaat SDA ini perlu dilakukan penilaian terhadap semua manfaat barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh SDA tersebut. Penentuan nilai ekonomi SDA merupakan hal yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan SDA yang semakin langka.

Valuasi ekonomi merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan, baik atas dasar nilai pasar (*market value*) maupun nilai non pasar (*non market value*). Valuasi ekonomi sumberdaya merupakan suatu alat ekonomi (*economic tool*) yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan (Hasibuan, 2014).

Penilaian terhadap jasa lingkungan hutan berupa pemanfaatan kawasan wisata alam terkadang menjadi bagian yang diabaikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya data dan informasi terkait pemanfaatan jasa lingkungan hutan untuk kegiatan ekowisata dan informasi yang terkait dengan nilai ekonomi dari jasa lingkungan hutan yang mendukung kegiatan kepariwisataan belum banyak tersedia. Hal ini menyebabkan diabaikannya eksistensi kawasan hutan dalam mendukung kegiatan kepariwisataan alam. Sungai dan aliran air yang ada dianggap sudah tersaji sedemikian rupa, tanpa memikirkan apa kontribusi tegakan hutan dan seluruh keanekaragaman hayati didalamnya terhadap penyajian potensi alam tersebut. Regulasi yang terkait dengan mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dari hasil hutan dan jasa lingkungan telah tersedia dan dapat dijadikan landasan hukum agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peraturan yang berlaku.

Potensi sumberdaya alam yang berasal dari jasa lingkungan hutan ini dapat terjaga dengan baik eksistensinya jika kawasan hutan lindung yang menjadi ekosistem pendukungnya dapat terjaga dengan baik pula. Fungsi hutan sebagai pengendali banjir dan erosi, penghasil udara bersih (oksigen) dan pengatur tata air dapat berjalan optimal jika kondisi ekosistemnya tetap dalam kondisi normal (Fauzi et al, 2011).

Pengembangan kawasan wisata diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi berupa pendapatan dari unit unit usaha yang terbentuk dengan adanya kawasan wisata, penyerapan tenaga kerja lokal tanpa



mengganggu ekologis kawasan hutan. Masyarakat yang beraktivitas mendorong sektor ekonomi lainnya agar wisata yang dikelola dapat berjalan dengan baik. Seiring berjalannya wisata ini tentunya akan menghasilkan output dalam proses pengelolaan hutan lindung dalam bentuk wisata alam. Sektor ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa, meningkatkan kewirausahaan nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah (Ulya dan Yunardy, 2006). Aktivitas pemanfaatan kawasan wisata alam tersebut tentunya membutuhkan input dari sektor ekonomi lain agar dapat berjalan dengan baik. Pada saat yang sama output yang dihasilkan oleh aktivitas wisata tersebut juga akan menginput sektornya sendiri dan sektor ekonomi lain yang terkait seperti perdagangan, jasa, pengangkutan, industri, atau sektor lainnya yang ada di wilayah itu dan sebagian lagi akan dikonsumsi dalam bentuk permintaan akhir.

Keterkaitan antara aktivitas pemanfaatan kawasan hutan wisata alam dengan sektor ekonomi lain akan memberikan dampak terhadap perekonomian wilayah dalam bentuk kontribusi sektor kehutanan terhadap struktur ekonomi wilayah, total output wilayah, pendapatan wilayah, dan penciptaan linkage effect (efek keterkaitan) baik keterkaitan ke depan (forward linkage effect) maupun ke belakang (backward linkage effect) dari pembangunan wisata di Kawasan Wisata Alam tersebut. Informasi mengenai hal-hal tersebut penting untuk diketahui karena akan

memudahkan pihak terkait dalam membuat perencanaan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pada daerah ini karena didasarkan pada data-data yang akurat dan representatif. Peningkatan sektor wisata dianggap sebagai sektor unggulan dalam perekonomian nasional. Jika ditinjau dari sisi sosial ekonomi, sektor ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa, meningkatkan kewirausahaan nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah (Harnida dan Tahir, 2012).

Dalam konteks pembangunan di Kota Palopo, potensi sumberdaya alam telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti *intake* PDAM Latuppa, Mangkaluku dan Bambalu, instalasi PLTMH Bambalu, Kawasan Wisata Alam Latuppa, Bambalu dan Batupapan, serta berbagai tempat lainnya yang mulai tumbuh sebagai destinasi wisata yang baru bagi masyarakat Kota Palopo dan sekitarnya. Saat ini pengembangan wisata yang memanfaatkan panorama dan kesejukan alam di Kota Palopo adalah Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante dan Kelurahan Kambo yang disebut sebagai Kawasan Wisata Alam Latuppa dan telah dikenal sejak lama oleh masyarakat luas, baik dari dalam maupun dari luar Kota Palopo. Beberapa *spot* wisata dalam kawasan ini sudah dikunjungi oleh masyarakat sebagai salah satu destinasi wisata alam di Kota Palopo.

Kawasan Wisata Alam Latuppa berada dalam wilayah DAS Pacangkuda/ Latuppa, yang merupakan salah satu DAS utama di Kota Palopo dan menjadi DAS prioritas nasional. DAS ini sebagian hulunya berada di Kecamatan Basesangtempe Utara Kabupaten Luwu dan selebihnya berada di wilayah Kota Palopo. Lahan hutan di hulu DAS Pacangkuda/Latuppa ini sebagian merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) bervegetasi hutan dan sebagian lagi merupakan hutan lindung dengan topografi yang dominan curam. Topografi ini yang membentuk aliran – aliran sungai yang berasal dari kawasan hutan lindung dan APL tersebut (KPHL Latimojong Unit VIII, 2019).

Di dalam Kawasan Wisata Alam Latuppa terdapat 6 spot wisata yaitu, Air Terjun Babak Latuppa, Sungai Jodoh, Air Terjun Siguntu, Bukit Kambo (Kambo Higland), Agro Waterboom, dan Taman Swimbath (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo, 2021), namun untuk sementara waktu Taman Swimbath tidak dapat dikunjungi karena masih dalam tahap renovasi oleh Pemerintah Kota Palopo, sementara Air Terjun Siguntu sangat jarang dikunjungi oleh wisatawan karena minimnya akses jalan ke lokasi yang sangat sulit untuk dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Keberadaan spot-spot wisata tentunya mendorong terbentuknya beberapa unit usaha disekitarnya seperti Cafe/warkop, penjual buah, toko kelontongan, penginapan/hotel, jasa/sewa, dan lainnya. Belum adanya penilaian ekonomi terhadap keempat spot wisata di kawasan wisata alam Latuppa menjadikan kawasan ini tidak mendapat

perhatian dari pemerintah setempat, padahal dengan mengetahui nilai ekonomi yang dihasilkan dari kawasan tersebut dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait bagaimana mengembangkan kawasan wisata agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan terbentuknya unit-unit usaha dari adanya kegiatan wisata.

Untuk perhitungan valuasi ekonomi kawasan wisata alam Latuppa maka dilakukan kuantifikasi seluruh manfaat dan fungsi kedalam nilai uang. Dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan pada perhitungan nilai manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung berupa potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan untuk nilai manfaat tidak langsung berupa nilai wisata/rekreasi dengan menggunakan metode biaya perjalanan (Loomis, Yorizane, and Larson, 2000).

Uraian tersebut diatas yang mendasari sehingga penelitian ini perlu dilakukan, bagaimana memberi penilaian ekonomi terhadap kawasan wisata alam latuppa beserta unit-unit usaha yang terbentuk dengan adanya kegiatan wisata tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan wisata alam yang dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan dalam perekonomian wilayah di sekitar kawasan wisata alam Latuppa, agar dapat mendukung pemenuhan kepentingan ekonomi daerah dan kepentingan ekologi ekosistem hutan yang membentuknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah belum adanya gambaran nilai ekonomi beberapa lokasi wisata yang berada pada Kawasan Wisata Alam Latuppa, dan unit unit usaha yang terbentuk dari adanya aktivitas wisata di Kawasan Wisata Alam Latuppa sehingga belum dapat diketahui kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian masyarakat di sekitarnya.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menganalisis nilai ekonomi kawasan Wisata Alam Latuppa
2. Mengidentifikasi unit-unit usaha yang terbentuk dari adanya aktivitas wisata di Kawasan Wisata Alam Latuppa
3. Menganalisis kontribusi pengelolaan kawasan Wisata Alam Latuppa terhadap perekonomian wilayah Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante, dan Kelurahan Kambo.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan deskripsi detail tentang nilai ekonomi jasa lingkungan hutan pada kawasan Wisata Alam Latuppa, meliputi nilai langsung (HHBK) dan nilai tidak langsung (Wisata). Serta menjadi referensi tambahan bagi para pihak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terkait valuasi ekonomi kawasan wisata alam dan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi instansi dan

beberapa pihak yang terkait dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata alam Latuppa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Valuasi Ekonomi

Valuasi ekonomi merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan, baik atas dasar nilai pasar (*market value*) maupun nilai non pasar (*non market value*). Valuasi ekonomi sumberdaya merupakan suatu alat ekonomi (*economic tool*) yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan (Hasibuan, 2014). Dalam konteks penelitian ini, menganalisis valuasi ekonomi dapat memberikan gambaran tentang nilai kuantitatif dari jasa lingkungan hutan yang dikelola sebagai objek ekowisata baik nilai manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung yang diperoleh pelaku usaha, masyarakat maupun pemerintah dari hasil kelola yang dilakukan.

Nilai ekonomi diartikan sebagai karakteristik (kualitas) dari sesuatu (barang dan jasa) yang menyebabkan/membuat sesuatu tersebut dapat dipertukarkan dengan sesuatu yang lain (Duerr,1993 dalam Salma and Susilowati, 2004). Nilai ekonomi juga dimiliki oleh ekosistem hutan dalam bentuk sumberdaya hutan berupa hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu dapat dikategorikan sebagai jenis barang yang diproduksi oleh hutan

(*tangible product*). Sedangkan jasa lingkungan dikategorikan sebagai jenis jasa yang dihasilkan ekosistem hutan dan dapat dinikmati oleh manusia namun tidak berwujud (*in – tangible product*).

Tingginya kerusakan ekosistem hutan akibat degradasi dan deforestasi telah menggerus nilai keekonomian sumberdaya hutan yang ada didalamnya. Kurangnya informasi terkait nilai keekonomian sumberdaya hutan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tergerusnya sumberdaya ini dan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Menurut (Hamdani, 2008), penilaian (valuasi) ekonomi SDA dan lingkungan merupakan serangkaian upaya /proses untuk mengkuantifikasi dan memberi nilai moneter (satuan uang) *monetizing* atas barang dan jasa SDA dan lingkungan tersebut dapat diketahui baik yang bersifat manfaat maupun korbanan/biaya.

Penekanan pada pertumbuhan ekonomi semata dapat menyebabkan kerusakan lingkungan alam yang tidak dapat diperbaiki. Misalnya, apabila kita terus membiarkan pabrik – pabrik memproduksi tanpa usaha untuk mencegah limbah beracun yang dikeluarkannya, atau apabila kita terus mengekstraksi hutan tanpa usaha yang cukup untuk reboisasi, maka pertumbuhan ekonomi akan dengan cepat terhenti. Jadi lingkungan alam juga merupakan unsur penting dari pertumbuhan ekonomi. Dan apabila kualitas lingkungan alam turun melebihi daya dukungnya, maka ekonomi akan kehilangan kemampuannya untuk tumbuh (Djajadiningrat, 1997)



Penilaian ekonomi bermanfaat untuk mengilustrasikan hubungan timbal balik antara ekonomi dan lingkungan, yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan SDH dengan baik, dan menggambarkan keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan berbagai pilihan kebijakan dan program pengelolaan SDH, sekaligus bermanfaat dalam menciptakan keadilan dalam distribusi manfaat SDH tersebut (Supratman et al, 2009).

Analisis data valuasi ekonomi yang utama berpusat pada metode perhitungan Total Economic Value (TEV). Nilai total ekonomi didapatkan melalui penambahan nilai guna (*use value*) maupun nilai tidak guna (*non use value*). Menurut Bann (1998) Tahapan lain yang diperlukan dalam kajian valuasi ekonomi ekosistem hutan diantaranya :

1. Nilai Guna Langsung (DUV) Manfaat langsung adalah nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan langsung dari sumberdaya ekosistem hutan :

$$DUV = DUV1 + DUV2 + DUV3..... + DUVn \text{ (Rp/tahun)}$$

2. Nilai Guna Tidak Langsung (IUV) Nilai guna tidak langsung adalah nilai yang dirasakan secara tidak langsung terhadap barang dan jasa yang dihasilkan sumberdaya dan lingkungan:

$$IUV = IUV1 + IUV2..... + IUVn \text{ (Rp/tahun)}$$

## B. Jasa Lingkungan Hutan

Jasa – jasa lingkungan pada dasarnya dinilai berdasarkan “*willingness to pay*”(WTP) dan “*willingness to accept*” (WTA). *Willingnes to pay* dapat diartikan sebagai berapa besar orang mau membayar untuk memperbaiki lingkungan yang rusak (kesediaan konsumen untuk membayar), sedangkan *willingnes to accept* adalah berapa besar orang yang mau dibayar untuk mencegah kerusakan lingkungan (kesediaan produsen menerima kompensasi) dengan adanya kemunduran kualitas lingkungan. Kesediaan membayar dan kesediaan menerima adalah parameter dalam penilaian ekonomi (Hasibuan, 2014).

Jasa lingkungan termasuk dalam kategori hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang terdiri dari produk biofisik (air dan karbon) dan produk psikologi (budaya dan keindahan). Ekowisata merupakan bagian dari jenis produk psikologi berupa keindahan, dalam skema jasa lingkungan masyarakat yang menjaga keindahan lokasi ekowisata disebut sebagai provider dan masyarakat atau pihak pihak yang menikmati keindahan alam dapat disebut sebagai buyer atau user keindahan dalam suatu lanskap (Yurlius, 2015).

Supratman et al, (2009) menguraikan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan adalah upaya pemanfaatan potensi jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang diberikan oleh fungsi ekosistem hutan dengan tidak merusak dan mengurangi fungsi pokok ekosistem hutan tersebut. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dapat berupa usaha rekreasi

hutan (wisata alam), usaha olah raga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon (*carbon trade*) atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

Ekowisata bisa diartikan berwisata ke dan mengunjungi kawasan alamiah yang relatif tak terganggu, dengan niat betul betul objektif untuk melihat, mempelajari, mengagumi wajah keindahan flora dan fauna, termasuk aspek – aspek budaya baik dimasa lampau maupun sekarang yang mungkin terdapat di kawasan tersebut (Pendit, 1999 dalam Retnowati, 2004)).

Sementara itu Fandeli (1995), mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.

### **C. Pemanfaatan Hutan untuk Wisata Alam**

Pada dasarnya semua potensi sumberdaya hutan berupa barang dan jasa, dapat dinilai dengan mata uang. Menurut Fauzi. A, (2014) secara implisit masyarakat memperlakukan barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan sebagai sesuatu yang dapat dinilai secara moneter. Dengan kata lain, barang dan jasa yang dihasilkan tersebut, seperti ikan, kayu, udara bersih, bahkan pencemaran sekalipun, bisa dihitung nilai rupiah atau nilai ekonominya karena kita asumsikan bahwa pasar itu eksis (market based), sehingga transaksi barang dan jasa dari sumberdaya alam tersebut dapat dilakukan.

Sumberdaya alam selain menghasilkan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi baik langsung maupun tidak langsung, juga menghasilkan jasa-jasa lingkungan yang memberikan manfaat dalam bentuk lain, misalnya manfaat *amenity* seperti keindahan, ketenangan, dan sebagainya yang sering lebih terasa dalam jangka panjang (Hamdani, 2008).

Lebih jauh dijelaskan oleh Tuwo (2011), bahwa manfaat peningkatan peluang ekonomi kawasan ekowisata antara lain (1) meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat atau penduduk local, (2) meningkatkan pendapatan, (3) berkembangnya usaha baru, (4) berkembangnya usaha atau kerajinan barang local, (5) meluasnya pemasaran dan peningkatan penerimaan devisa, (6) meningkatkan standar hidup masyarakat dan peningkatan pendapatan pajak daerah, (7) mendorong karyawan dan masyarakat untuk mempelajari ketrampilan baru, dan (8) meningkatnya sumber pendanaan untuk perlindungan alam dan pemberdayaan masyarakat local.

Minat ataupun *trend* kunjungan wisata saat ini yang mengarah pada lokasi wisata yang berbasis pada keindahan bentangan alam (ekoturisme), mendorong pemerintah dan para pelaku usaha kepariwisataan untuk mengembangkan objek wisata seperti ini sebagai kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan. Menurut (Alikondra, 2012), konsep ekoturisme bertumpu pada empat hal penting bagi keberlanjutan pembangunan, yaitu (1) penyelamatan fungsi – fungsi

ekosistem sehingga keanekaragaman hayati dapat dipertahankan, (2) meningkatkan kondisi social – ekonomi masyarakat, (3) melindungi dan melestarikan keanekaragaman budaya masyarakatnya, (4) meningkatkan sumber – sumber devisa negara. Keempat hal ini satu sama lain saling terkait dan masing – masing berperan penting sebagai factor penggerak bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan.

#### **D. Keterkaitan Antar Sektor Pembangunan**

Pengembangan kepariwisataan khususnya wisata alam membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder, baik pemerintah melalui penerbitan beberapa kebijakan atau peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kepariwisataan, maupun peran dari pelaku usaha dan masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal merupakan salah satu komponen berkelanjutan pada umumnya dan wisata alam pada khususnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa manfaat penting dari kebijakan dan perencanaan wisata alam adalah memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut meliputi pekerjaan baru, tambahan pendapatan, pasar bagi produk lokal, perbaikan infrastruktur, fasilitas dan layanan masyarakat, teknologi dan keahlian baru, peningkatan kepedulian budaya dan lingkungan, perlindungan dan konservasi, serta perbaikan pola penggunaan lahan (Asmin, 2017)

Menurut Alikondra (2012), pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara benar sangat tergantung pada kapasitas institusinya,

seperti sumberdaya manusia, organisasi dan aturan untuk melaksanakan berbagai kebijakan pengelolaan termasuk norma dan etika yang berlaku di masyarakatnya. Komponen – komponen penentu bagi kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini secara komprehensif sangat perlu untuk ditingkatkan terus ditingkatkan kemampuannya.

Supratman et.al (2009), menyebutkan bahwa sebagai penggerak sektor ekonomi lainnya, maka hasil hutan memberi dukungan modal bagi pembangunan infrastruktur industri dalam negeri dan untuk penyediaan teknologi yang berasal dari impor. Dukungan lainnya adalah banyak kegiatan yang dibiayai langsung dari hasil kayu tebangan untuk mendorong kegiatan perkebunan, sebagai hasil konversi hutan. Produk hasil hutan , baik berupa kayu maupun bukan kayu, adalah merupakan bahan baku industri, yang mendorong berkembangnya industri dan jasa (pengangkutan dan pemasaran).

Keterkaitan antara satu sektor pembangunan dengan sektor lainnya dapat dianalisis dengan menggunakan Analisis Input – Output (Analisis I – O). Menurut Badan Pusat Statistik, (2005) *dalam* Nurlina (2018) pengertian Tabel Input Output adalah suatu tabel yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar sector ekonomi serta saling keterkaitan antara sector yang satu dengan sector yang lainnya dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu dengan bentuk penyajian berupa matriks

Secara sederhana analisis input output menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antarsatuan kegiatan ekonomi untuk suatu waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk tabel yang disebut tabel input output. Tabel input output adalah sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang menggambarkan transaksi barang dan jasa antara sektor-sektor ekonomi pada suatu periode tertentu. Isian panjang baris menunjukkan alokasi output dan isian menurut kolom menunjukkan pemakaian input dalam proses produksi (Ulya, 2008)

Kerangka analisis tabel input output secara deskriptif akan menunjukkan secara umum kondisi perekonomian suatu wilayah melalui beberapa variabel dan indikator, antara lain (Badan Pusat Statistik, 1999):

1. Struktur output dapat menunjukkan peranan sektoral dalam perekonomian.
2. Struktur nilai tambah digunakan untuk melihat peranan sektoral dalam menciptakan nilai tambah/pendapatan wilayah.
3. Indeks daya penyebaran (*backward linkage effect ratio*) dan indeks daya kepekaan (*forward linkage effect ratio*) jika dipetakan secara serempak dalam satu grafik dapat menentukan keunggulan suatu sektor dalam perekonomian.

Keterkaitan ke belakang berhubungan dengan bahan mentah/bahan baku. Sebagai contoh, untuk menghasilkan output, sektor kehutanan memerlukan input dari sektor industri (alat berat), bangunan,

transportasi, dan komunikasi. Perubahan permintaan akhir untuk sektor kehutanan akan berdampak pada output sektor industri, bangunan, transportasi, dan komunikasi. Keterkaitan ke depan berhubungan dengan penjualan barang jadi/output. Sebagai contoh, output sektor kehutanan digunakan sebagai input oleh sektor lain seperti industri kehutanan, industri manufaktur, dan bangunan. Perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor yang menggunakan output sektor kehutanan sebagai input akan berdampak pada output dari sektor kehutanan (Ulya, 2008). Sektor yang memiliki daya penyebaran tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan atau daya dorong cukup kuat dibandingkan sektor lainnya. Sebaliknya sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi berarti sektor tersebut mempunyai ketergantungan (kepekaan) yang tinggi terhadap sektor lain (Badan Pusat Statistik , 2005).

#### **E. Peran Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian**

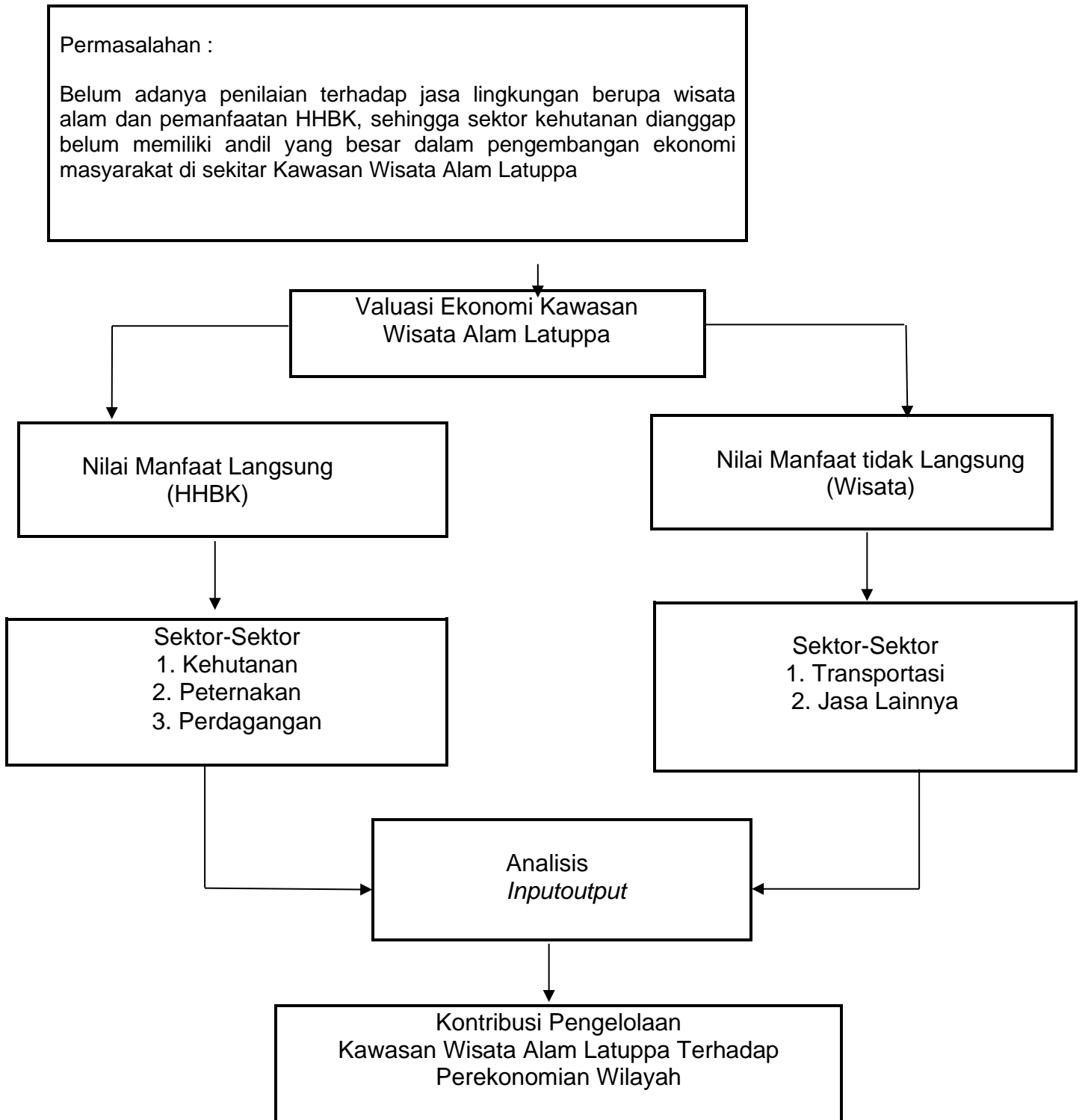
Menurut Kementrian Negara Lingkungan Hidup (2007), kontribusi sektor Kehutanan secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa sehingga mereka mempunyai daya beli yang tinggi, meningkatkan konsumsi rakyat di pedesaan yang memberikan kontribusi pertumbuhan sekitar 4% dari pertumbuhan Nasional sekitar 6,5%. Pembangunan kehutanan sejauh ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan wilayah. Dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir, sumberdaya hutan telah menjadi modal utama pembangunan



ekonomi nasional, dengan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan penerimaan pemerintah, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor kehutanan dalam penerimaan devisa pada tahun 1992 - 1997 tercatat sebesar US\$ 16,0 milyar, atau sekitar 3,5 persen dari PDB nasional (Badan Pusat Statistik, 2000).

Meskipun kontribusi sektor kehutanan terhadap total nilai tambah nasional (Produk Domestik Bruto) menurun dari 4,3 persen pada tahun 1993 menjadi 2,3 persen pada tahun 2002, namun nilai tambahnya meningkat dari Rp.14,1 triliun menjadi Rp. 36,2 triliun. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah terpencil melalui ketersediaan jalan HPH bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, bertambahnya kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat (Ulya, 2006)

## F. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, guna mengetahui dan memberikan gambaran pengelolaan beberapa lokasi wisata alam di Kawasan Wisata Alam Latuppa. Dalam penelitian ini dikaji tentang nilai ekonomi (valuasi ekonomi) jasa lingkungan hutan yang menjadi lokasi wisata alam dan keterkaitan antara sektor pendukung kepariwisataan alam, sehingga diperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan dasar kebijakan pengelolaan kawasan tersebut. Jasa lingkungan yang dinilai dibatasi pada nilai manfaat langsung yaitu nilai manfaat HHBK yang dikelola masyarakat dan nilai manfaat tidak langsung berupa nilai manfaat wisata/nilai rekreasi dari kawasan wisata alam tersebut serta unit-unit usaha yang terbentuk dari adanya kegiatan wisata di kawasan wisata alam Latuppa.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kawasan Wisata Alam Latuppa yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Mungkajang Kota Palopo yang meliputi Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante dan Kelurahan Kambo. Penelitian berlangsung dari awal bulan Februari 2021 sampai akhir bulan Juni 2021.